

DAMPAK PENERAPAN SISTEM ZONASI BAGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA CIMAHI

Julian Adema Mulyana¹⁾, Yamardi²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Dampak Penerapan Sistem Zonasi Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kota Cimahi” penelitian ini berangkat dari permasalahan kebijakan pemerintah mengenai penerapan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru, dengan melihat data yang ada bahwa belum optimalnya penerapan sistem zonasi di Kota Cimahi mengalami seperti penurunan kualitas input siswa yang menyebabkan penurunan prestasi akademis sekolah, verifikasi data tempat tinggal yang dimanipulasi oleh orang tua murid, belum efektifnya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini menggunakan teori indikator atau kriteria evaluasi oleh Dunn dalam (Nugroho, 2003, hal. 429) yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 13 orang. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dampak Penerapan Sistem Zonasi Bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kota Cimahi di nilai mengalami penurunan dalam kualitas pendidikan. Dampak Penerapan Sistem Zonasi Di Kota Cimahi mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan karena tidak ada tekanan dari nilai akademis untuk diterima, mengalami penurunan dorongan motivasi belajar siswa.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Sistem Zonasi, Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Abstract

This research is entitled "The Impact of the Implementation of the Zoning System for Improving the Quality of High School Education in Cimahi City" this research departs from the problem of government policies regarding the implementation of the zoning system for the admission of new students, by looking at existing data that the application of the zoning system in Cimahi City has not been optimal, such as a decrease in the quality of student input which has led to a decrease in school academic achievement, verification of residence data manipulated by parents of

students, has not been effective for improving the quality of education. This study uses the theory of indicators or evaluation criteria by Dunn in (Nugroho, 2003, p. 429), namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Respectivity, and Accuracy. The research method used is a qualitative method with a descriptive type. The data collection techniques used were literature study, observation, interviews, and documentation. The informants in this study were 13 people. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. Based on the results of the research, it is known that the impact of the implementation of the zoning system for improving the quality of high school education in Cimahi City is considered to have decreased in the quality of education. The impact of the implementation of the zoning system in Cimahi City resulted in a decrease in the quality of education because there was no pressure from academic scores to be accepted, experiencing a decrease in student motivation.

Keywords: *Evaluation, Zoning System Policy, Improving the Quality of High School Education*

PENDAHULUAN

Mendapatkan pendidikan sangat penting untuk kesuksesan dalam hidup. Dasar pertumbuhan pribadi seseorang adalah pendidikannya. Seseorang memperoleh informasi, kemampuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam hidup melalui pendidikan. Pentingnya pendidikan terletak pada kemampuannya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkelanjutan. Menurut H. Horne dikutip dalam (BP, Munandar, Fitriani, Karlina, & Yumriani, 2022, hal. 4) pendidikan adalah suatu proses yang menyangkut penyesuaian diri secara bertahap terhadap diri yang lebih tinggi dari seorang individu yang telah matang jasmani dan rohani, terbebas dari realitas keagamaan dan mempunyai pengetahuan tentang Tuhan yang tergambar dari sifat intelektual, emosional atau kemanusiaan seseorang.

Kebijakan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai implikasi dari pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan hingga daerah-daerah, melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Mempersiapkan sebuah generasi Bangsa Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang layak demi adanya perubahan positif bagi bangsa ini terdapat lagi

beberapa sekolah yang sangat diminati oleh calon peserta didik, sedangkan di beberapa sekolah lainnya kurang peminat. Akan tetapi, dalam kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang lain.

Penerapan kebijakan pemerintah terhadap sistem zonasi pada tingkat Sekolah Menengah Atas Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Cimahi belum optimal. Hal ini menciptakan situasi yang tidak adil bagi mereka karena mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih sekolah pilihan mereka dan berlokasi jauh dari rumah. Lokasi Sekolah Menengah Atas belum menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Cimahi. Karena sistem zonasi mengutamakan jarak antara rumah anak dan sekolah dibandingkan prestasi siswa, siswa dengan nilai bagus dan semangat belajar tidak dapat bersaing untuk masuk sekolah terbaik. Siswa yang tinggal jauh dari sekolah negeri juga mengalami kesulitan untuk mendaftar di sekolah negeri karena kalah saing oleh siswa yang tinggal dekat dengan sekolah tersebut.

Melihat permasalahan tersebut, perubahan yang ingin dicapai dari penerapan Sistem Zonasi dalam PPDB ini adalah adanya pemerataan akses layanan pendidikan dan kualitas pendidikan. Diharapkan semua peserta didik dapat menikmati pendidikan dan kualitas pendidikan yang layak dan berkualitas. Juga dapat menjangkau semua peserta didik di Kota Cimahi khususnya untuk sekolah negeri.

Melihat kondisi yang terjadi, maka kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru diharapkan dapat terlaksana dengan baik serta berjalan sesuai dengan tujuan awal dari lahirnya kebijakan ini. Kemudian mampu untuk menghasilkannya sumber daya manusia yang bermutu dan berpotensi sebagai penerus Bangsa Indonesia.

Landasan dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai

konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian berikut diantaranya:

1. Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan kerangka konsep dan prinsip yang disebut kebijakan yang digunakan untuk menguraikan strategi pelaksanaan kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Menurut Dunn (2007), kata politik berakar dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Dalam bahasa Yunani pemerintahan disebut *polis* yang berarti negara-kota, dalam bahasa Sansekerta disebut *pur* yang berarti kota, dan dalam bahasa Latin disebut *politia* yang berarti air tanah.

Evaluasi kebijakan atau kebijakan dapat mencakup proses pengambilan keputusan utama suatu organisasi, seperti mengenali pilihan, memprioritaskan program atau pengeluaran, dan membuat keputusan berdasarkan pengaruhnya. Kebijakan dapat dianggap sebagai alat administratif, keuangan, manajemen, atau politik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Holwet dan M.Ramesh yang dikutip dalam (Subarsono, 2005, hal. 13) mereka berpendapat bahwa ada lima langkah dalam proses kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun agenda, khususnya proses dimana suatu isu dapat menarik perhatian perhatian pemerintah.
- 2) Perumusan kebijakan, khususnya proses yang dilakukan pemerintah untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan.
- 3) Pembuatan kebijakan, menetapkan undang-undang dan prosedur yang mengizinkan pemerintah untuk melakukan atau melarang tindakan. Membuat kebijakan dan proses untuk memandu tindakan pemerintah.
- 4) Implementasi, mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai hasil, yang merupakan proses.

- 5) Evaluasi kebijakan, hasil kerja atau kebijakan dipantau dan dipilih untuk evaluasi kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Secara terminologis, pengertian kebijakan publik sangat luas, tergantung bagaimana cara memahaminya. Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintahan, tidak hanya dalam arti “pemerintah” mengacu pada aparatur negara, namun “tata kelola” juga mengacu pada pengelolaan sumber daya publik. Istilah “*policy*” dalam bahasa Inggris “*policy*” berasal dari bahasa Latin, tepatnya kata *polis* yang berarti komunitas atau komunitas (perkumpulan) kehidupan manusia, masyarakat atau negara.

Kebijakan publik, menurut Pressman dan Widavsky (Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, 2002, hal. 17), merupakan sebuah hipotesis dengan keadaan awal dan hasil yang diprediksi.

Kebijakan publik adalah bagaimana suatu entitas pemerintah berinteraksi dengan lingkungannya, menurut Eystone dalam (Solichin, 2015, hal. 13).

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing merujuk kepada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan “penaksiran” (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assasment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya”.

Adapun lebih spesifik menurut Dunn (2003, hal. 608) menyatakan bahwa evaluasi adalah berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai maka akan memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program

telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah- masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Dalam kegiatan pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana program suatu kebijakan maka evaluasi sering dipakai untuk meliputi segala macam pertimbangan dalam kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan untuk melihat keefektifan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan sangat diperlukan untuk melihat suatu kesenjangan antara kenyataan dan harapan dari tujuan pelaksanaan kebijakan, untuk mempertegas definisi evaluasi kebijakan menurut Jones dalam (Winarno, 2014, hal. 229) menjelaskan secara singkat bahwa evaluasi kebijakan adalah “kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan”.

4. Sistem Zonasi

Kata “zonasi” berasal dari kata “zona” yang berarti suatu kawasan atau wilayah yang mempunyai tugas dan ciri lingkungan hidup tertentu. (Moechtar, 2011). Dalam bahasa Inggris, zonasi adalah zoning. Pada beberapa negara peraturan zonasi (*zonasi regulation*) dikenal juga dengan istilah *land development code*, *zoning code*, *zoning ordinance*, *zoning resulation*, *zoning bylow*, *urban code*, *panning act*, dan lain-lain. Secara teori, pembagian lahan menjadi banyak zona dengan batas-batas yang ditetapkan secara hukum melalui pembatasan zonasi berupaya memisahkan pertumbuhan pemukiman dan komersial dari pembangunan industri dan komersial (Korlena, Djunaedi, Probosubano, & Ismail, 2011). Sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya, KBBI menggambarkan sebagai pembagian suatu wilayah menjadi beberapa bagian.

Sistem zonasi merupakan salah satu peraturan pendidikan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Setiap pemerintah daerah menetapkan radius zona berdasarkan peraturan masuk terkait sekolah. Calon siswa

yang bertempat tinggal di sekitar radius tertentu dari jumlah siswa yang akan diterima diwajibkan oleh hukum untuk diterima. Sistem ini dikenal sebagai “sistem zona”. Aturan ini berlaku bagi siswa yang terdaftar di lembaga pendidikan yang disponsori pemerintah pada semua jenjang pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dalam penelitian ini. Alih-alih berupa data numerik yang diperoleh dari perhitungan statistik, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut Neuman (2014, hal. 13) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang membangun teori sepanjang proses pengumpulan data. Teknik ini juga fleksibel dan terkadang disebut sebagai teknik induktif, karena teknik ini membangun teori dari data atau didasarkan pada data yang sudah ada. Dalam penelitian ini unit analisisnya yaitu: 1) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat (KCD VII) beralamat di Jl. Mahar Martanegara No 48, Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. 2) SMAN 2 Cimahi beralamat di Jl. KPAD Sriwijaya IX Nomor 45 A, RT.08/RW. 16, Setiaamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. 3) SMAN 3 Cimahi beralamat di Jl. Pesantren No.161, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. 4) SMAN 6 Cimahi beralamat di Jl. Melong Raya Nomor 172, Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. 5) Orang tua murid/masyarakat yang merasakan langsung dampak dari penerapan kebijakan tersebut. 6) Siswa/murid yang merasakan dan mendaftarkan diri ke sekolah. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan atau verifikasi. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 6 berlokasi di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.

PEMBAHASAN

Evaluasi ditujukan untuk memberikan penaksiran, pemberian nilai dan memberikan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang memberi kebijakan, membantu dalam penyelesaian dan perumusan kembali masalah.

Sebelum adanya evaluasi pastilah adanya sebuah pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Untuk mengukur dampak dari sebuah kebijakan peneliti menggunakan indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn dalam (Nugroho, 2003, hal. 429) mencakup enam indikator yaitu: 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Pemerataan, 5) Responsivitas, dan 6) Ketepatan. Jawaban dari setiap informan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Penerapan sistem zonasi di sekolah menengah atas di Kota

Cimahi memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Sistem zonasi bertujuan untuk meratakan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan dengan memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Namun, sistem ini juga memunculkan kritik karena membatasi pilihan sekolah bagi siswa berbakat yang tinggal jauh dari sekolah yang diinginkan dan adanya praktik tidak etis dalam penerimaan. Di satu sisi, sistem zonasi dianggap adil karena memberikan kesempatan lebih besar kepada siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Namun, di sisi lain, kuota zonasi yang besar dianggap menghambat siswa lainnya yang memiliki prestasi akademis tinggi tetapi tidak berada dalam zona terdekat. Selain itu, penerapan sistem zonasi juga berdampak pada kualitas akademis siswa yang diterima di sekolah. Sebelum zonasi, seleksi siswa didasarkan pada nilai akademis yang ketat, yang memastikan bahwa siswa yang diterima memiliki potensi akademis tinggi. Namun, setelah zonasi diterapkan, terjadi penurunan kualitas input siswa, yang pada akhirnya berpengaruh pada prestasi akademis dan tingkat penerimaan di perguruan tinggi negeri (PTN). Meskipun kualitas pengajaran di sekolah tidak berubah, kualitas input siswa yang menurun menyebabkan penurunan output pendidikan. Motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh sistem zonasi ini. Beberapa siswa merasa lebih termotivasi karena kemudahan akses ke sekolah, namun banyak yang mengalami penurunan motivasi karena tidak ada tekanan akademis untuk diterima di sekolah. Faktor lain seperti dukungan keluarga dan lingkungan belajar di sekolah juga mempengaruhi motivasi ini.

2. Efisiensi

Penerapan sistem zonasi di sekolah menengah atas di Kota Cimahi memiliki dampak yang beragam pada berbagai aspek pendidikan. Meskipun sistem zonasi mempengaruhi proses penerimaan siswa dengan memprioritaskan jarak tempat

tinggal, perubahan dalam metode pengajaran atau kurikulum lebih terkait dengan kebijakan pendidikan nasional dan perkembangan kurikulum itu sendiri. Pemerintah terus memantau dan mengevaluasi sistem ini untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga, dan sekolah-sekolah mengikuti arahan pemerintah dalam mempertahankan kualitas pengajaran meskipun ada perubahan kurikulum. Sistem zonasi juga berdampak positif pada tingkat kehadiran siswa, karena jarak yang lebih dekat antara rumah dan sekolah memudahkan siswa untuk hadir secara konsisten. Namun, tantangan muncul dalam hal kemampuan siswa untuk menyesuaikan diri dengan standar akademik yang tetap tinggi, terutama di sekolah seperti SMAN 2 Cimahi. Hal ini dapat meningkatkan risiko putus sekolah bagi sebagian siswa yang kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis yang ada.

3. Kecukupan

SMAN Kota Cimahi, mayoritas siswa dan orang tua merasa bahwa dukungan yang diberikan oleh guru dan staf sekolah sudah cukup baik dan merata, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang atau jalur masuk melalui sistem zonasi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa guru dan staf tidak membedakan perlakuan terhadap siswa, meskipun ada beberapa pandangan yang menunjukkan bahwa beberapa guru masih membahas latar belakang siswa terkait jalur zonasi. Beberapa siswa merasa bahwa dukungan yang diberikan bersifat standar tanpa perlakuan istimewa, sementara beberapa orang tua menyatakan puas dengan dukungan yang diberikan oleh sekolah. Secara umum, fasilitas dan sumber daya di SMAN Kota Cimahi dianggap merata dan tidak mengalami perubahan signifikan meskipun ada penerapan sistem zonasi. Pihak dinas menyatakan bahwa jika ada kekurangan fasilitas di sekolah, sekolah dapat melaporkannya, dan laporan tersebut akan direspon sesuai

kebutuhan. Pihak sekolah menyatakan bahwa sarana prasarana tetap sama, namun pandangan siswa bervariasi. Beberapa siswa mengidentifikasi kekurangan seperti kondisi kamar mandi dan kurangnya dukungan untuk kegiatan siswa. Orang tua siswa juga mencatat perbedaan fasilitas antara sekolah saat ini dengan sekolah sebelumnya, namun secara keseluruhan, tidak ada perbedaan mencolok yang dirasakan antar sekolah.

4. Pemerataan

Sistem zonasi dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam akses pendidikan dengan membagi wilayah berdasarkan perkelurahan. Meskipun pihak dinas menilai sistem ini adil karena pembagian wilayah yang jelas, ada pandangan bahwa siswa yang tinggal jauh dari sekolah merasa dirugikan. Untuk memastikan keadilan, penting untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas di semua sekolah dalam setiap zona. Selain itu, penyesuaian dalam sistem zonasi diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan akses yang lebih adil bagi semua siswa. Sistem ini juga memberikan manfaat signifikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan mempermudah akses mereka ke sekolah negeri. Dengan perbaikan yang tepat, sistem zonasi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan.

5. Responsivitas

Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pendidikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki. Masalah verifikasi data tempat tinggal dan penanganan siswa berkebutuhan khusus menjadi kendala yang memerlukan perhatian khusus. Pemerataan fasilitas pendidikan juga dianggap krusial untuk memastikan bahwa semua siswa, terutama yang tinggal jauh dari sekolah, mendapatkan akses yang setara. Selain itu,

fleksibilitas dalam penempatan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia menjadi harapan para orang tua dan siswa agar sistem zonasi dapat berjalan dengan lebih adil dan efektif.

6. Ketepatan

Penerapan sistem zonasi saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun evaluasi dan komunikasi rutin dilakukan untuk memastikan PPDB berjalan sesuai prosedur, masih terdapat berbagai masalah yang belum teratasi. Beberapa informan mengungkapkan bahwa efektivitas sistem zonasi belum terlihat dari penurunan jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta belum ada peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan. Ada pandangan bahwa sistem zonasi mungkin efektif untuk menyamaratakan akses ke sekolah dan meningkatkan mobilitas siswa, namun belum memberikan dampak positif yang jelas terhadap kualitas pendidikan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa sistem zonasi dapat mengurangi dorongan belajar siswa dan menyebabkan frustrasi bagi siswa berprestasi yang tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan.

KESIMPULAN

Sistem zonasi dalam pendidikan bertujuan untuk meratakan akses pendidikan dengan mengutamakan siswa dari sekitar sekolah, namun masih menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Meskipun sistem ini dianggap adil oleh sebagian pihak karena membantu siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu, pembatasan pilihan sekolah bagi siswa berbakat yang tinggal jauh dan adanya praktik tidak etis dalam penerimaan menjadi kritik utama. Di sekolah menengah atas di Cimahi, penerapan zonasi menyebabkan penurunan kualitas akademis siswa karena seleksi yang sebelumnya berbasis nilai

akademis kini lebih mengutamakan jarak rumah, yang berdampak pada stabilitas prestasi akademis dan penerimaan di perguruan tinggi. Motivasi belajar siswa juga bervariasi; beberapa siswa merasa lebih termotivasi karena kemudahan akses, sementara yang lain mengalami penurunan motivasi karena kurangnya tekanan akademis. Selain itu, meskipun sistem zonasi mempengaruhi penerimaan siswa, perubahan dalam metode pengajaran dan kurikulum lebih terkait dengan kebijakan pendidikan nasional. Sistem zonasi telah meningkatkan kehadiran siswa karena jarak yang lebih dekat antara rumah dan sekolah, namun tantangan dalam menyesuaikan diri dengan standar akademik yang tinggi tetap ada, terutama di SMAN 2 Cimahi. Dukungan dari guru dan staf sekolah di SMAN Kota Cimahi secara umum dianggap baik dan merata tanpa diskriminasi, meskipun ada beberapa pandangan yang menyebutkan adanya pembahasan tentang latar belakang siswa terkait zonasi. Dalam hal fasilitas, penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan signifikan meskipun penerapan zonasi, meskipun persepsi individu terhadap kualitas fasilitas bisa bervariasi. Meskipun sistem zonasi dinilai adil karena pembagian wilayah yang jelas, beberapa siswa yang tinggal jauh merasa dirugikan. Untuk meningkatkan keadilan, diperlukan perbaikan kualitas dan fasilitas di semua sekolah dalam zona, serta penyesuaian sistem zonasi untuk mengatasi ketimpangan. Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk menciptakan keadilan, tantangan seperti verifikasi data tempat tinggal dan penanganan siswa berkebutuhan khusus perlu diperhatikan. Namun, secara keseluruhan, penerapan sistem zonasi saat ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan perlu dipertimbangkan perbaikan atau penyesuaian agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BP, A. R., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Unismush*, 2 No. 1, 4.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. (2007). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GajahMadaUniversityPress.
- Korlena, Djunaedi, A., Probosubano, L., & Ismail, N. (2011). Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan BencanaKasus: Arkadelphia City, Arkansas USA. *Jurnal Forum Teknik*, 34 No.1.
- Moechtar, O. (2011). Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan. *Yuridika*, 26 No. 2.
- Neuman, W. L. (2014). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7 ed.). Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputoindo.
- Solichin, A. W. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

